PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(Suatu *Executive Summary* Naskah Akademik)

Armen Yasir

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeristas Lampung

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah.

Kata kunci : *Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Sentralisasi kebijakan menyangkut pengaturan dan penguasaan sumberdaya hutan di daerah menempatkan Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dan di bawah kontrol Departemen Kehutanan. Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat yang sebenarnya memahami persoalan dan potensi sumberdaya alam di daerah tidak dapat mengembangkan alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal. Tidak ada ruang dan kesempatan bagi daerah agar aspirasi masyarakat diakomodasi di dalam

kebijakan, mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta konflik dengan masyarakat atas pengelolaan sumberdaya hutan yang semakin menguat dan berlarut-larut.

Terjadinya pergeseran paradigma dan orientasi pengurusan sumberdaya alam (hutan) pasca reformasi dalam kerangka legal yang mengakui dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga keseimbangan manfaat ekonomi dan kelestarian fungsi ekologi sumberdaya alam. Kebijakan sistem penguasaan dan pengusahaan lahan di dalam maupun di sekitar kawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat

memberikan jalan keluar terhadap pemecahan masalah pengelolaan kawasan hutan melalui pendekatan kultur sosio-ekologis.

Dalam upaya untuk mensinkronkan kebijakan disektor kehutanan diperlukan suatu peraturan yang bersifat kholistik sesuai kebutuhan dan kewenangan yang ada, guna dijadikan acuan setiap sektor dalam pengelolaan sumber daya hutan atau yang berhubungan dengan sumber daya hutan. Untuk membentuk peraturan yang bersifat kholistik dibidang kehutanan itu dibutuhkan suatu naskah akademik yang memuat gagasan pengaturan serta materi muatan perundang-undangan (materi Hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik futuristik dan dari berbagai aspek ilmu.

Metode Pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen (data-data tertulis, hasil seminar, hasil FGD, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data, dan informasi melalui website, yang berkaitan dengan sumberdaya hutan) dan literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Disisi lain norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau adat/hukum adat. Hal ini dilakukan untuk mendapat dasar kajian secara sosiologis, yuridis dan filosofis

II. KAJIAN TIORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Aspek Tioritis

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum dimaksud sebagaimana dikatakan oleh Antony Allott (1980; 2); *Law: a coherent, total, particular, legal system prevailing in a given community or country*". Hukum dalam pengertian ini pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai perwujudan dari kebijakan yang akan diterapkan secara ajeg.

Reformasi hukum dan politik yang kembali bergulir sebagai akibat penggantian Presiden telah mendorong pembenahan sekaligus pembaharuan dalam politik hukum negara dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berlakunya UU Otonomi Daerah yang terakhir dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai implikasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang semula lebih bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Politik desentralisasi menjadi landasan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk bidang lingkungan.

Dari sudut konseptual menurut Sonny Keraf (dalam M. Akib, 2008; 182-183) otonomi daerah akan lebih menguntungkan bagi lingkungan hidup. Dari sisi etika, Sonny keraf menyatakan tujuan desentralisasi adalah (1) lebih memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat secara baik, (2) demi menjamin demokrasi, yaitu memungkinkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan kebijakan publik, dan memungkinkan kontrol serta pertanggungjawaban publik yang lebih baik, (3) kebijakan publik bisa lebih baik karena benar-benar mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat, dan (4) desentralisasi membawa dampak positif berupa pemangkasan rentang birokrasi dan berarti mengurangi peluang korupsi.

Dari sudut pandang optimistik, desentralisasi pengelolaan lingkungan akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kebijakan desentralisasi dapat menghindari terjadinya penyederhanaan masalah alam, ekologi, hubungan sosial dan lingkungan, yang pada era sentralisasi (orde baru) menjadi penyebab gagalnya penerapan kebijakan lingkungan, rusaknya hutan yang berakibat hilangnya keragaman hayati dengan menampilkan kearifan lokal.

Strategi kebijakan pembangunan kehutanan haruslah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan (*rural development*). Menurut Prakoso (dalam Abdul Hakim 2005; 109-110) Ada 3 (tiga)

asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan dan pembangunan pedesaan, yaitu :

- a. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan disekitar hutan, yang kehidupannya bergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan;
- b. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain, dan perlunya faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan; dan
- c. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

Bertolak dari ketiga asumsi di atas, maka dikemas pola baru dengan *social forestry* atau hutan kemasyarakatan, sebagai suatu pola kehutanan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Reformasi dalam sub sektor kehutanan telah telah mengubah sistem pengelolaan hutan yang berkarakter kapitalistik dan tidak demokratis, kearah pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem hutan yang berdampingan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Prinsip hutan untuk rakyat yang dikehendaki dalam reformasi kehutanan (Fattah, 2002; 49). Dengan adanya prinsip ekosistem hutan dan pada masyarakat, diharapkan dapat

mengundang partisipasi masyarakat dan dapat lebih memberdayakan mereka.

Menurut Paul (1986) tujuan dari partisipasi adalah, *pertama*; untuk berbagi beban terutama dalam menanggung ongkos pembangunan, *Kedua*; meningkatkan efisiensi kegiatan melalui keterlibatan aktif sehingga sasaran proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat, *Ketiga*; meningkatkan efisiensi baik karena keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan atau karena peningkatan kesadaran, *Keempat*; proses pemberdayaan. Desentralisasi menghasilkan peningkatan interaksi, hubungan yang lebih dekat antar masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam kaitannya dengan keberadaan masyarakat yang kuat untuk mengelola hutan, diperlukan modal sosial sebagai salah satu bentuk modal yang sangat berharga selain sumberdaya manusianya. Modal sosial tidak diwujudkan dalam orang tertentu, tetapi melekat dalam hubungan sosial orang. Modal sosial mengacu pada norma dan jaringan kerja masyarakat sipil untuk melancarkan tindakan kerjasama diantara warga negara dan institusi mereka.

2.2. Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma

Adanya pendistribusian urusan sebagaimana ditentukan Pasal 11 UU No. 32 Tahun 2004 dapat dikatakan mengacu kepada kriteria eksternalitas; yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, kriteria akuntabilitas; yaitu penanggungjawab penyeleng-

garan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dan terakhir berdasar kriteria efisiensi, yaitu penyelenggara suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Selanjutnya dalam UU ini dinyatakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dapat bersifat wajib dan dapat pula bersifat pilihan (lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 tahun 2004).

Otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diberikan landasan dalam Pasal 63 ayat (2 dan 3) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menentukan tugas dan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa urusan tertentu di bidang lingkungan akan didesentralisasikan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Daerah berwenang mengatur urusan tertentu dibidang lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan asas otonomi.

Adanya urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka amanat ketentuan Pasal 3 UU NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasannya yang cukup

dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, lebih dapat diwujudkan.

2.3. Praktik Penyelenggaraan

Pengelolaan kehutanan pada masa Orde Baru di dasarkan pada kebijakan system pengelolaan kehutanan pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis maupun kepentingan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Akibat kebijakan seperti ini telah menciptakan proses kehancuran hutan yang berjalan sangat signifikan, pasti dan bergulir terus tanpa tertahankan sampai memasuki era reformasi yang disebabkan baik oleh banyaknya berbagai jenis kepentingan -ekonomi, politik, sosial dan sebagainya yang terdapat di dalam Instansi terkait, antar Departemen, antar Pusat dan Daerah, antar Instansi dan antar individu di dalam daerah sendiri masuk, bertarung dan berkolaborasi, dan bahkan mendorong kebijakan dalam system pengelolaan hutan yang sangat eksploitatif.

Propinsi Lampung sering disebut sebagai *contoh terbaik* dari *buruknya* kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia sekaligus menjadi ajang uji coba sebagian kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi kebijakan menyangkut pengaturan dan penguasaan sumber daya hutan di daerah, menempatkan Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dan dibawah kontrol Departemen Kehutanan. Pemerintah Daerah yang sebenarnya memahami persoalan dan potensi sumberdaya alam setempat, tidak dapat mengembangkan alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal (Tim PSDHBM Watala, 2004;6).

Kerusakan hutan di Lampung sudah memasuki tahapan mencemaskan. Pada tahun 2000, dari 1.004.735 ha luas kawasan hutan di Lampung, tinggal sekitar 328.603 ha (32,70 %) yang masih berhutan. Pembukaan lahan dan penebangan liar yang eskalasinya meningkat tajam pada era reformasi, menambah panjang deretan persoalan pengelolaan kehutanan di Lampung dengan tingkat kerusakan hutan yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Fenomena ini dapat ditemukan hampir disemua lokasi kawasan hutan di Lampung.

Sebagian besar wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat adalah kawasan hutan (71,73 %) dari luas Kabupaten, sedangkan sisanya adalah kawasan yang dapat diusahakan menjadi kawasan budi daya, pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga pemukiman penduduk, sarana umum, perkotaan dan sebagainya.

Permasalahan kehutanan di Kabupaten Lampung Barat berhubungan dengan Luasnya kerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas yang telah mencapai lebih kurang 241.148 ha, konflik satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat sekitar hutan, konflik batas kawasan hutan (patok batas hilang, rusak, dan bergeser), luas lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan, dan perambahan hutan dan *illegal logging* (Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat).

Kesalahan dalam proses *deforestasi* yang terjadi masa orde baru dan masih terus berjalan hingga sekarang kerusakan itu, bukan terletak pada reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi di sektor kehutanan, tetapi sebaliknya lebih pada sentralisme yang sudah mengakar dalam berbagai aspek pemerintahan, dan tidak adanya otonomi daerah, sehingga melahirkan kebijakan yang tidak memperhatikan partisipasi masyarakat di daerah yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi semata yang memandang hutan sebagai suatu komoditas ekonomis, bukan sesuatu yang hidup dan mengandung kehidupan, sehingga harus dieksloitasi secara besar-besaran oleh konglomerasi maupun multinasional dengan modal besar dan teknologi canggih.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Hutan melaksanakan berbagai fungsi, sebagai penyimpanan dan pengatur air, sumber *plasma nutfah* tumbuhan dan binatang, penabung

cadangan tanah, sumber energi, sumber cadangan energi, sumber bahan produksi dan kebutuhan manusia dan lain sebagainya. Masa era globalisasi sekarang, hutan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia dan sebagai penjaga ekosistem planet bumi. Ini berarti hutan tidak lagi hanya dimiliki sendiri oleh bangsa Indonesia dan masyarakat di daerah di mana hutan itu berada, tetapi telah menjadi milik masyarakat dunia.

Melalui demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, kebijakan dalam sektor kehutanan tidak lagi berasal semata-mata dari Pemerintah Pusat, kebijakan tidak lagi bersifat dari atas –ke bawah, tetapi kebijakan itu harus telah mempertimbangkan kondisi, keberadaan dan peranan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya yang lebih mengetahui kondisi setempat. Pemanfaatan hutan harus bersamaan dengan upaya demokratisasi, menegakkan hak asas manusia, dan perubahan tata ekonomi global yang lebih adil.

3.2 Landasan Sosiologis

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Meningkatnya erosi dan menurunnya aliran air terutama adalah akibat pengundulan hutan pada hulu daerah aliran sungai menunjukkan tingkat reboisasi dan penghijauan belum berhasil menang dalam berpacu dengan kecepatan perusakan hutan.

Kerusakan hutan pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan yang bersifat sentralistik dan dengan

pendekatan sektoral. pendekatan sektoran menunjukkan tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga berjalan sesuai dengan visi sektoralnya masing-masing tanpa memperhatikan dan memperhitungkan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya hutan. Orientasi produksi komoditas yang bersifat spesifik di setiap sektor, sering tidak menghargai peran sumberdaya hutan sebagai fungsi publik, misalnya hutan yang menjadi bagian penentu kualitas dan keberlanjutan daerah aliran sungai. Secara *inheren*, pendekatan sektoral merupakan pendekatan reduksionis sehingga ukuran kinerja pembangunan dirumuskan secara parsial. Dalam kondisi yang demikian, seandainya setiap sektor berhasil pun, berbagai kebutuhan publik yang diperlukan seperti aspek lingkungan hidup, kebutuhan antar generasi, dan sebagainya tidak akan mampu terpenuhi.

Selain adanya kondisi di atas terdapat faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat yang diidentifikasi sebagai berikut :Tekanan penduduk, kemiskinan, Rendahnya kesadaran lingkungan, Ketaatan terhadap hukum relatif masih kurang, dan Penegakan hukum yang lemah.

3.3 Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan pembagian urusan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah otonom, serta keinginan masyarakat untuk memperoleh jaminan hukum dalam

peran serta untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kehutanan yaitu:

UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

UU. No. 41 tahun 1999 tentang tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 dan telah ditetapkan dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP. Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan terkait juga dengan PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Undang-undang terkait lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTUAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Adanya PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan di daerah, maka daerah mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasi pengelolaan hutan sesuai kondisi daerahnya masing-masing, dengan demikian sasaran yang hendak diwujudkan adalah adanya suatu pedoman dan mekanisme pengelolaan sumber daya hutan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan multifihak baik, Pemerintahan Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Apabila hukum sebagai produk politik, maka politik sangat menentukan hukum. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara itu.

Adapun yang menjadi ruang lingkup materi Peraturan Daerah mencakup sebagai berikut :

1. Ketentuan umum; memuat rumusan batasan pengertian/definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah (Perda) yang pengaturannya lebih dari atau paling sedikit 5 pasal (didasarkan pada ketentuan kovenensi yang berlaku di dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan), Sedangkan apabila pengaturan hanya disinggung selintas, pengertian/defenisinya diletakkan dalam pasal yang bersangkutan. Depenisi yang diberikan yang berhubungan dengan hutan yang kondisinya secara riil ada di Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Adapun yang menjadi tujuan pengaturan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Lampung Barat terutama dalam rangka mewujudkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi, sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah; adanya mekanisme pengelolaan sumberdaya hutan secara terpadu dan komprehensif

sehingga diharapkan dengan pengelolaan yang demikian, maka fungsi hutan tetap terjaga, terkendali pemanfaatan hutan, dan tercapai perlindungan hutan.

3. Hak dan Kewajiban: pengaturan berhubungan dengan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban masyarakat di Daerah Kabupaten Lampung Barat, maupun hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan sesuai kedudukannya masing-masing.
4. Pengelolaan Sumberdaya hutan; Dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menetapkan tata hutan sehingga di dapat zona hutan sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan dengan tata batas maupun penatagunaan hutan, kemudian baru dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
 - 4.1. Pengaturan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan tanpa merubah fungsi hutan. Oleh karenanya pemanfaatan hutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Masyarakat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.2. Di dalam Perda ini juga diatur tentang Hutan Kemasyarakatan, Hutan Pekon, dan hutan adat sesuai kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Perda ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk menetapkan areal hutan kemasyarakatan, dan menerbitkan izin hutan kemasyarakatan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu, yang akan dilakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan izin hutan apakah sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan wilayah zona hutan dan kawasan hutan yang menjadi urusan dan kewenangannya untuk menjadi hutan pekon, yang pengelolaannya didasarkan izin pengelolaan hutan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah tertentu yang secara nyata dikuasai oleh masyarakat adat dan diatur menurut hukum adatnya atau menetapkan wilayah tertentu yang merupakan tanah negara untuk menjadi hutan adat apabila terpenuhi syarat-syaratnya.
- 4.3. Selain pengaturan hutan kemasyarakatan, hutan pekon, dan adat, dalam perda ini diatur juga tentang pembangunan hutan tanaman rakyat yang ditetapkan oleh Bupati di

atas areal hutan produksi yang tidak produktif. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem sivikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

- 4.4. Pemanfaatan repong damar dapat dilakukan sebatas mengambil getah pohon damar, hasil tanam tumbuh jenis pohon lainnya, penelitian, pengembangan dengan tanpa merusak kelestarian repong damar dan ekosistemnya, sedangkan Pemanfaatan kayu pohon damar hanya dapat dilakukan terhadap pohon yang telah tumbang dan atau tidak produktif lagi, setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- 4.5. Bupati dapat menetapkan areal tanah yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam satu kesatuan ekosistem sebagai hutan hak. Hutan hak harus memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, oleh karena itu Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan hutan hak agar fungsi hutan hak tidak berubah statusnya.
- 4.6. Di dalam Perda ini diatur juga kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tata hutan, pelaksanaan

penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, hutan kemasyarakatan, hutan pekon, an hutan adat, repong damar, hutan tanaman rakyat dan hutan hak. Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap hutan, kawasan hutan dan pengelolaan hutan. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan sumber daya hutan; Hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilaporkan kepada Dinas Kehutanan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hasil dan bukti-bukti pengawasan. Pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah; Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa ; monitoring; evaluasi; dan atau tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan.

- 4.7. Di dalam perda juga diatur kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan

kawasan hutan dari tindakan-tindakan yang dapat merusak dan atau menimbulkan potensi kerusakan yang berakibat hilangnya fungsi hutan dan kawasan hutan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan.

- 4.8. Pengaturan akhir dari pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu berhubungan dengan rehabilitasi, reklamasi hutan dan konservasi alam baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari potensi awal kerusakan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan proses alam, dan pengendalian kebakaran hutan, maupun pemegang izin pengelolaan sumber daya hutan yang menimbulkan dampak potensi kerusakan hutan dan lahan serta ekosistemnya.
5. Dalam Perda diatur Wewenang dan Tanggungjawab; yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk; (a) menentukan segala kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan termasuk pengelolaan repong damar, (b) memberikan izin usaha pemanfaatan hutan dan kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, (c) mencabut segala izin yang diberikan apabila tidak dikelola, dikelola tidak sesuai peruntukannya dan atau disalahgunakan, (d) menetapkan zona hutan yang dapat dimanfaatkan dan atau dikelola maupun tidak dapat dimanfaatkan dan atau dikelola, dan mengambil tindakan dan tuntutan ganti rugi maupun tuntutan pidana terhadap setiap kegiatan yang menyebabkan berubahnya fungsi sumber daya hutan.
6. Perda juga mengatur peran serta masyarakat; pengaturan peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan agar sifat, karakteristik hutan tidak berubah fungsinya. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, LSM, lembaga berbadan hukum dan lembaga pendidikan.
7. Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat baik pengelola sumberdaya hutan maupun masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah, LSM, badan usaha, praktisi, aktivis lingkungan, akademisi maupun masyarakat itu sendiri.
8. Pengaturan tentang Insentif dan disinsentif yang merupakan penghargaan bagi semua pihak yang secara nyata telah melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perlindungan dan pengamanan hutan serta rehabilitasi, reklamasi hutan dan konservasi alam di Kabupaten Lampung

Barat. Memberikan insentif dan disinsentif bagi pengelola repong damar yang telah berhasil mengembangkan dan melesarikan repong damar. Memberikan insentif dan disinsentif bagi masyarakat yang telah menetapkan tanah milik atas inisiatif pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan hak dengan fungsi lindung atau konservasi dengan tidak mengubah statusnya. Memberikan disinsentif bagi semua pengelola sumberdaya hutan yang telah berhasil melakukan pengelolaan hutan lestari. Pemberian disinsentif dapat diberikan setiap tahun, sedangkan pemberian insentif diberikan sesuai rencana dan mata anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya.

9. Di dalam Perda juga diatur masalah kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan yang diswakelola oleh Pemerintah Daerah dengan Kabupaten dan atau Kota yang berdampingan dengan Kabupaten Lampung Barat dan atau yang mendapatkan manfaat dari fungsi hutan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat.
10. Untuk menjamin pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan, para pihak dapat meminta sertifikasi setiap perencanaan pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan sumberdaya hutan. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan sertifikasi tertulis yang menunjukkan bahwa dokumen pengelolaan

sumberdaya hutan pemegang izin, termasuk proses dan metodenya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Perda ini juga mengatur tentang kewajiban pendataan sumber daya hutan setiap tahun dan akses informasi sumberdaya hutan, dengan adanya pengaturan ini, maka dapat dimiliki data base tentang (a) potensi sumber daya hutan yang berhubungan dengan; luas, kondisi fisik dan karakteristiknya; (b) zona yang telah ditetapkan baik yang berhubungan dengan inventarisasi, tata batas dan penataan; (c) pemetaan dan lokasi sumberdaya hutan yang dapat dikelola maupun yang tidak dapat dikelola; (d) rencana pengelolaan sumber daya hutan baik jangka panjang maupun jangka pendek; (e) areal hutan dan kawasan hutan yang yang dikelola baik oleh Pemerintah Daerah secara swakelola, maupun pemegang izin pemanfaatan sumber daya hutan; (f) areal hutan tertentu yang ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan pekon, hutan tanaman rakyat, hutan hak, dan kawasan hutan tujuan khusus, (g) langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan serta kondisi terakhir kondisi sumberdaya hutan yang dikelola baik yang berhubungan dengan aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan perlindungan (h) hasil yang telah dicapai dalam rangka rehabilitasi, reklamasi hutan

serta konservasi alam yang telah dilakukan.

12. Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya hutan yang bukan merupakan tindak pidana diselesaikan oleh Dewan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat terdapat Dewan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang memiliki tugas salah satunya penyelesaian sengketa pengelolaan lingkungan.
13. Segala pembiayaan pengelolaan sumberdaya alam termasuk rehabilitasi, reklamasi dan konservasi alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara swakelola maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan sumber daya lain yang sah. Sedangkan segala biaya pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan pemegang izin pengelolaan sumberdaya hutan ditanggung oleh pemegang izin sendiri.
14. Bagian akhir dari perda mengatur tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana disini berhubungan dengan pidana administratif.
15. Dalam bagian penutup perda ditentukan penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

VI. SIMPULAN

Pengelolaan kehutanan pada masa Orde Baru didasarkan pada kebijakan sistem pengelolaan kehutanan pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis maupun kepentingan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Akibat kebijakan seperti ini telah menciptakan proses kehancuran hutan yang berjalan sangat signifikan, pasti dan bergulir terus tanpa tertahankan sampai memasuki era reformasi.

Kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat sudah sangat mengkhawatirkan, dari luas areal hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan konservasi yang telah mengalami kerusakan baik dalam tahap agak kritis, kritis maupun sangat kritis mencapai 67,79 % dan bila dibandingkan dengan total kawasan hutan kerusakan hutan telah mencapai lebih dari 91 %.

Otonomi daerah telah mengubah tata kelola pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Lokus pembangunan bergeser dari Pusat (nasional) ke Daerah berpeluang tinggi untuk mencapai demokratisasi, perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan akses ekonomi masyarakat. Reformasi dalam sub sektor kehutanan telah mengubah sistem pengelolaan hutan yang berkarakter kapitalistik dan tidak demokratis, kearah pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem hutan yang berdampingan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat yang tinggal disekitar hutan memiliki pengetahuan luas dan mendalam

terhadap hutan termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Proses desentralisasi dapat meningkatkan kesempatan partisipasi dengan mendekatkan kekuasaan dan sumbernya kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mempengaruhi Pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat digunakan baik sebagai cara untuk mensukseskan desentralisasi dan sekaligus sebagai tujuan dari desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib. Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan, Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, Makalah Seminar Internasional, 2003, *Otonomi Daerah, Partisipasi, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Proses Kehancuran Hutan di Kalimantan*.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press.
- H. S. Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Kusworo, Ahmad, 2000, *Perambah Hutan Atau Kambing Hitam, Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung*, Pustaka Latin.
- Salim, Emil, 1990, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Silalahi Daud, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yasir, Armen, 2008, *Hukum Perundang-Undangan*, LP. Universitas Lampung.
- _____, 2009, *Hukum Otonomi Daerah (Buku Ajar)*, Kerjasama Fakultas Hukum Unila-Pemda Lampung.
- _____, 2010, *Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah*, Makalah Penyusunan Kerangka Kebijakan & Strategi Perwujudan Pemerintahan Yang Baik di Lampung Selatan (SCBD Project).
- Zen. M.T., 1982, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, Jakarta-Bandung.
- Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), 2001, *Otonomi Sumberdaya Hutan*, Bandar Lampung.
- Tim PSDHBM Watala, 2004, *Kepastian Pengelolaan Di Kawasan Hutan Negara, Pengalaman Belajar Bersama di Sumber Jaya*, Pustaka Watala.
- Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta.